

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 445/05 /SK/DINKES-PS/I-2022
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
1	Arsip peta foto udara	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Selama dialaminya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan	- UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan j	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum / pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknnya memperoleh manfaat ekonomi
3	Surat rahasia	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak Terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan
4	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
5	Disposisi surat pimpinan	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Selama belum ada tindak lanjut dari Sekretariat atau Bidang pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

6	Rencana pelaksanaan tukar menukar/ pemindahhanganan barang daerah	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf e dan I	Setelah proses selesai	Bertpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkanoleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai
	PEMERINTAHAN				
7	Surat pengaduan masyarakat	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
	PERATURAN PERUNDANGAN				
8	Rancangan Peraturan / keputusانبupati pada saat proses harmonisasi di bagian Hukum	- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
9	Rancangan Peraturan / keputusan Kepala Dinas Kesehatan pada saat proses harmonisasi	- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
10	Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

11	Berita Acara pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM				
12	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
13	Informasi perkara pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.	- Kep Menhukham No. 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri No. 41 Tahun 2007 tentang PASN di Lingkungan Pemda - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, I, dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
14	KESEJAHTERA ANRAKYYAT				
14	Rencana alokasi bersubsidi	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Hurufe	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
	MEDICAL REPORT				
15	Identitas tersangka dan korbankanus narkoba untuk kegiatan penyelidikan	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Hurufa, h, dan I	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

16	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	- UU No. 35 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1); - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
17	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	- UU No. 35 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
18	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangkapegabatan dan dicatat dalam rekam medis	- Permenkes No. 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat (1); - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf e - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkapkan Rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkapkan Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
19	Hasil audit medik pada saranakesehatan	- Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/2005 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
20	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat menguikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunankebijakan tidak terhambat

21	Data Kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Atas jjin yang bersangkutan	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
22	Data kelayakan UPT(penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h, l dan j	Atas jjin yang bersangkutan dan jjin dari pemangku kepentingankebijakan	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunankebijakan tidak terhambat
23	Data Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf j	Atas jjin yang bersangkutan	Potensi menimbulkan kerawanan / kekhawatiran masyarakat	Sebagai analisis kebijakan daerah
24	Hasil Audit Terkait DenganMedical Error	- Kepmenkes No. 496/Menkes/SK/IV/2005 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	Sampai audit diterima olehyang berhak dan atas jjin penerima hasil audit	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait drngan bidang kesehatan	Menjaga ketentraman masyarakat
	PEREKONOMIAN				
25	Surat Perijinan yang diterbitkanoleh Dinas Kesehatan	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan j	Sampai dikeluarkannya jjinusaha; selama izin masih dipergunakan	Mengungkapkan data pribadi pemegang izin	Menjaga privasi dari pemegang izin

26	Lokasi Server	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j 	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
27	Internet Protocol/ IP Address/Private	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j 	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
28	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j 	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
29	Sistem Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j 	Selama masih difungsikan /digunakan	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara	Tertjaga dari potensi kerugian
30	PENGADAAN BARANG DANJASA				
	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j 	Sampai proses selesai / diketahui pemenuhannya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang / jasa sesiaio dengan prinsip-prinsip pengadaan danetika pengadaan

37	Penilaian uji kompetensi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai selesainya ujikompetensi	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
38	Hasil evaluasi tenaga Kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi
39	Data hasil Medical check Upperorangan ASN/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Atas jin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
40	Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
41	Data Rencana penempatan ASN/CASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf I	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib

42	Notulen hasil sidang BaperjakerInternal Dinkes	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai hasil baperjaker ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
43	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjaker Internal Dinkes	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai hasil baperjaker ditindaklanjuti	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
44	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan structural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural, Pasal 14 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Selama masih berlaku dan dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
45	Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan structural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural, BAB III; Keputusan Kepala BKN No. 13 Th 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Th 2002, Lampiran I Angka Romawi II huruf B No. 4 dan 5, dan huruf C dan D - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sesuai dengan ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun	Pertimbangan-pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah
46	Soal Tes CASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Sampai selesainya test / seleksi	Dapat mengganggu proses rekrutmen ASN dan merusak kerahasiaan seleksi	Menjaga akuntabilitas seleksi


47	Daftar nilai DP3 dan SKP ASN	- PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ASN, Pasal 5/6 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, l, dan j	Atas ijin yang bersangkutan	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan
48	Keputusan peninjauan Hukumdisiplin ASN	- PP Nomor 53 Tahun 2010; - Perka BKN No. 21 Th 2010, Romawi IX Angka 8 UU Noh, l, dan jg KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf l	Sampai turunnya peninjauan hukumdisiplin	Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga obyektivitas putusan
49	Keputusan ijin/keterangan tentangpenceritaan ASN	- PP No. 10 Th 1983 jo. PP No. 45 Th 1990 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, l, dan j	Sampai keluarnya keputusanyijin	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan ijin
50	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a. Kenaikan pangkat b. Kenaikan gaji berkala c. Mutasi d. Pensiun e. Administrasi kepegawaian	- PP No. 9 Th 2003 tentang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pembertentian ASN; UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, l, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilankeputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan / menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
51	Biodata elektronik ASN lengkap	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, l, dan j	Selama yang bersangkutan menjadiASN	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privacy yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan ASN yangbersangkutan

52	Data kepegawaian perorangan ASN lengkap	- UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai ASN	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
53	Arsip data perorangan ASN	- UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j		Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
54	Daftar usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Setelah usulan direalisasikan	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan
55	Daftar pejabat yang akan dilantik	- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural, BAB III Keputusan Kepala BKN No. 13 Th 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Th 2002, Lampiran I Angka Romawi II huruf B No. 5 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK / pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

56	Instrumen Tes potensi/kompetensi ASN/Pejabat	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tespotensi / kompetensi ASN /pejabat	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedangberlangsung
57	Identifikasi potensi ASN	- Keputusan Kepala BKN No. 37 Th 2011 tentang Pedoman Penataan ASN - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h, I, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilankeputusan yang terkait	Dapat mengganggu rahasia pribadi ASN yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakandan melindungi rahasia ASN yang bersangkutan
58	KEUANGAN Dokumen proses pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan daerah laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai dengan telah diaudit oleh aparaturn pemeriksa/pengawasan/auditor(BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaanpembangunan

59	Database Objek Pajak dan Retribusi	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Atas ijin yang bersangkutan	Melanggar privasi wajib pajak / retribusi	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi
----	------------------------------------	---	-----------------------------	---	---

Ditetapkan di : Painan
 Pada Tanggal : 5 Januari 2022



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP. 197011042000121001